

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia adalah negara yang multikulturalisme, dimana terdapat suatu keberagaman didalam kebudayaannya, hal ini dikarenakan oleh karena di dalam negara ini memiliki tingkat nilai pluralisme yang sangat tinggi. Sikap pluralitas ini sudah lama tercemin dari masa Kolonial hingga kini. Selain terdapat suku asli yang berada menetap di kepulauan Indonesia, juga ada suku-suku dan etnis pendatang lain yang menetap di kepulauan Indonesia. Seperti suku Batak, Dayak, Jawa, Bugis, etnis Arab, etnis Tionghoa, etnis India. Perkembangan etnis di seluruh negara Indonesia telah menjadi satu dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sedangkan dalam masa pergantian rezim Orde lama ke Orde Baru lalu ke Reformasi sangat mempengaruhi dinamika kehidupan kebudayaan etnis-etnis pendatang, misalnya seperti etnis Tionghoa.

Maka dari itu, orang-orang dari komunitas Tionghoa dianggap sangat sukses daripada orang-orang Indonesia, pada akhirnya dapat menyebabkan sikap anti-Tionghoa yang berawal dari tragedi kemanusiaan yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998 dimana seluruh kalangan orang dari etnis Tionghoa mengalami trauma yang mendalam. Tidak itu saja, orang-orang Tionghoa juga mendapatkan pengalaman yang sangat pahit pada masa pemerintahan Orde baru melalui beberapa kebijakan pemerintah pada masa itu dengan cara Diskriminasi.

Pada masa akhir dari pemerintahan Orde Baru telah mengembalikan penggunaan istilah Tionghoa untuk menyebut nama dari kalangan etnis Tionghoa. Istilah Cino atau Cina telah dihapuskan. pada masa awal Presiden B.J.Habibie juga tidak mempunyai rasa simpatik terhadap kalangan etnis Tionghoa di Kota Sidoarjo. Selain itu para aktivis Orde Baru dengan sikap yang sadar terhadap makna dari istilah Cina sebagai nama panggilan untuk orang-orang Tionghoa dan dengan sendirinya meninggalkan istilah nama Cina sebagai panggilan dari seluruh orang-orang Tionghoa.

Sedangkan pada masa Reformasi, lebih tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasanya disapa Gus Dur. Etnis Tionghoa mendapatkan angin segar berupah bisa menjalankan kebebasan dalam hal berbudaya, misalnya merayakan Tahun Baru Imlek, melakukan tari Barongsai, dan tari Naga Liang. Gus Dur memberikan kebebasan bagi kalangan orang-orang etnis Tionghoa dalam menjalankan kebudayaan melalui surat Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000, tanggal 17 Januari 2000. Sehingga pada saat itu Gus Dur mendapatkan gelar “BAPAK TIONGHOA”.

Dengan dikeluarkannya Keperaturan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000 telah menjadi sebuah peraturan yang sangat kompleks. Peraturan tersebut telah memberikan sebuah kebebasan kepada seluruh orang dari etnis Tionghoa dari bidang agama, adat-istiadat, kebudayaan. Sedangkan implementasi dari Keppres tersebut ialah telah menjadi bebas orang Tionghoa dalam menjalankan kebudayaan. Dengan legalitas kebudayaan tersebut etnis Tionghoa dapat mementaskan tari Barongsai dan tari Naga Liang seperti tradisi etnis lainnya.

Sidoarjo dapat dikatakan sebagai salah satu kota yang tidak terdampak pada krisis dan tragedi kerusuhan kemanusiaan yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998. Karena ada suatu kedekatan hubungan kebudayaan antara orang-orang Tionghoa dan masyarakat Sidoarjo yang terjalin dengan baik. Sikap rukun sangat nampak pada kehidupan multikultural yang dapat terlihat dengan baik pada kehidupan sehari-hari. Hasilnya tidak terjadi gesekan yang dapat menimbulkan sebuah konflik seperti di kota-kota lain yang ada di Indonesia. Dan warga komunitas Tionghoa dapat melaksanakan aktivitas tanpa ada gangguan.

Eksistensi kebudayaan dari kalangan etnis Tionghoa di Kota Sidoarjo terutama disekitar Komunita Tionghoa yang ada di Jl. Gajah mada dan di Kelenteng Tjong Hok Kiong masih terjaga dengan baik. Walaupun pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat pembatasan terhadap etnis Tionghoa dalam menjalankan kebudayaannya, sedangkan di Kelenteng Tjong Hok Kiong adalah salah satu tempat yang berperan sangat besar sebagai tempat untuk mempertahankan kebudayaan dari etnis Tionghoa. Komunikasi yang dibangun sangat baik antara pengurus Kelenteng Tjong Hok Kiong, masyarakat setempat dan pihak aparat keamanan dengan memberikan rasa aman terhadap orang etnis Tionghoa yang hendak menjalankan ibadah. Dan upaya pemerintahan dalam menetapkan Kelenteng Tjong Hok Kiong sebagai salah satu cagar budaya merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap hasil eksistensi kebudayaan Tionghoa.

Sejumlah hasil kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk menghilangkan sikap diskriminasi anti-Tionghoa yang pernah dilakukan kepada kalangan orang-orang Tionghoa selama pemerintahan Orde Baru. Presiden

Abdurrahman disebut sebagai Bapak Tionghoa karena beliau adalah salah satu tokoh yang sudah mengembalikan eksistensi kebudayaan Tionghoa dan mengakui agama Konghucu sebagai agama resmi, sehingga etnis tionghoa bebas melakukan kegiatan keagamaan maupun kebudayaan tanpa adanya gangguan serangan dari luar.

Sikap pluralisme yang telah diterapkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara adalah sikap yang tidak dapat dihilangkan di Indonesia. Terutama keberadaan Kelenteng Tjong Hok Kiong adalah salah satu simbol keberadaan dari terbentuknya komunitas orang-orang Tionghoa di Kota Sidoarjo. Orang-orang dari etnis Tionghoa tetap melestarikan hasil kebudayaan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka di Tiongkok. Dengan adanya ajaran Tri Dharma yang sudah berkembang di Kelenteng Tjong Hok Kiong adalah salah satu keberagaman budaya etnis Tionghoa di Kota Sidoarjo.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan diatas, beberapa saran yang bisa penulis berikan terkait dari hasil penelitian Skripsi yang berjudul Dinamika Kebudayaan Etnis Tionghoa di Kota Sidoarjo Tahun 1965-2000 sebagai berikut: Untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, bagi setiap warga negara Indonesia harus menjaga sikap kerukunan, saling menghargai antar ras, suku, etnis, dan agama lain. Serta tidak mudah untuk dipengaruhi dengan beberapa isu-isu yang berbaur sikap sentimen atau rasisme.

Bagi masyarakat pada umumnya, khususnya untuk warga Kota Sidoarjo untuk selalu menjaga sikap kerukunan dan sikap saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, agar terjadi konflik antar ras, suku, etnis, dan agama di Kota Sidoarjo.

Bagi diri pribadi peneliti dan seluruh mahasiswa dari STKIP PGRI Sidoarjo, sebagai generasi muda apalagi telah menjadi seorang mahasiswa wajib menjadi seorang pelopor bagi kehidupan yang sangat rukun, saling menghargai, dan sangat toleran. Seorang mahasiswa harus menjadi seorang yang sangat teladan dan seorang sosialisator di masyarakat tentang isu-isu rasial dan berita bohong tidak dapat menyebar di masyarakat.